

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

PEMERINTAHAN PRESIDEN B.J. HABIBIE (1998-1999): KEBIJAKAN POLITIK DALAM NEGERI

Oleh:

Alberto Ferry Firnandus

Universitas Sanata Dharma

2015

Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) proses peralihan kepala pemerintahan dari Soeharto ke B.J. Habibie; (2) kebijakan dalam negeri pemerintahan B.J. Habibie; (3) akhir dari pemerintahan B.J. Habibie.

Metode yang digunakan penulisan sejarah dengan langkah-langkah heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosial-politik. Cara penulisannya bersifat deskriptif analitis.

Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa: (1) krisis ekonomi tahun 1997 dan dugaan KKN serta tuntutan reformasi membuat Presiden Soeharto lengser dari jabatannya sebagai Presiden, dengan demikian Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi Presiden menggantikan Soeharto; (2) Presiden B.J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, Kebijakan politik yang diambil yaitu, pembebasan tahanan politik pada masa Orde Baru, kebebasan pers, pembentukan parpol dan percepatan pemilu, penyelesaian masalah Timor Timur, dan pengusutan kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya; (3) penolakan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie serta terpilihnya Abdurrahman Wahid dan Megawati sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 1999-2004 menandai berakhirnya pemerintahan Presiden B.J. Habibie.

ABSTRACT
GOVERNMENT PRESIDENT B.J. HABIBIE (1998-1999):
DOMESTIC POLITICAL POLICY

By:
Alberto Ferry Firnandus
Sanata Dharma University
2015

This paper aims to describe: (1) the process of transition from Head of the Indonesian Government Soeharto to BJ Habibie; (2) The domestic policies of BJ Habibie; (3) the end of the reign B.J. Habibie.

The method used includes heuristic measures , verification , interpretation , and historiography . The approach used is a socio - political approach . The way of writing is descriptive analytical method.

The results of this paper show that: (1) the economic crisis in 1997 and allegations of corruption and demands for reform led President Soeharto to step down from his position as President, thus the Vice President BJ Habibie succeeded Suharto a become president; (2) President B.J. it formed the Development Reform Cabinet, political policy are taken, namely, the release of political prisoners during the New Order, freedom of the press, the establishment of political parties and election acceleration, Completion East Timor, and the prosecution of the wealth of Suharto and his cronies; (3) The rejection of the President's accountability and Abdurrahman Wahid and Megawati's election as President and Vice President of the Republic of Indonesia during the 1999-2004 period marked the end of President BJ Habibie.